BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting, dengan pendidikan orang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan dan permasalahan global dalam kehidupan. Era globalisasi, pendidikan menjadi suatu yang mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin atau ekonomi rendah. Rendahnya partisipasi pendidikan pada kelompok miskin adalah biaya pendidikan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan. Perkembangan pemikiran manusia dalam memberikan batasan tentang makna dan pengertian pendidikan, setiap saat selalu menunjukkan adanya perubahan. Perubahan itu didasarkan atas berbagai temuan dan perubahan di lapangan yang berkaitan dengan semakin bertambahnya komponen sistem pendidikan yang ada. Berkembangnya pola pikir para ahli pendidikan, pengelola pendidikan dan pengamat pendidikan yang membuahkan teori-teori baru.

Kemajuan alat teknologi turut andil dalam mewarnai perubahan makna dan pengertian pendidikan tersebut. Pada saat yang sama, proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus berlangsung. Karena itu, bisa jadi pandangan seseorang tentang makna atau pengertian pendidikan yang dianut oleh suatu negara tertentu, pada saat yang berbeda dan di tempat yang berbeda makna dan pengertian pendidikan itu justru tidak relevan. Namun demikian, selama belum ada teori dan temuan baru tentang makna dan pengertian pendidikan, maka teori dan temuan yang telah ada masih relevan untuk dimanfaatkan sebagai acuan. Pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu.

Sampai sekarang ini, pendidikan tidak mempunyai batasan untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap karena sifatnya yang kompleks seperti sasarannya yaitu manusia. Sifatnya yang kompleks itu sering disebut ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan kelanjutan dari pendidikan. Ilmu pendidikan lebih berhubungan dengan teori pendidikan yang mengutamakan pemikiran ilmiah. Pendidikan dan ilmu pendidikan memiliki keterkaitan dalam artian praktik serta teoritik. Sehingga, dalam proses kehidupan manusia keduanya saling berkolaborasi. Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pemb[illegible] baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masy[illegible] dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan.

Dalam mendukung Pendidikan di Indonesia Pemerintah yang telah melaksanakan desentralisasi yang mana hal ini diawali dengan diterbitkannya UU Otonomi Daerah. Hal ini berimbas pula pada urusan pendidikan, di mana masalah pendidikan diserahkan ke pemerintah daerah. Pusat berfokus pada standar, peraturan, prosedur, dan kebijakan. Sedangkan untuk masalah anggaran, sumber daya manusia, dan aset dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi pun hanya sebagai koordinator. Selama pelaksanaan otonomi daerah, dunia pendidikan terlihat memprihatinkan. Di mana sekolah sebagai tempat dalam meningkatkan sumber daya manusia banyak yang kurang perhatian, proses pembelajaran yang kurang kreatif karena berjalan apa adanya, serta banyaknya sarana prasarana sekolah yang tidak berfungsi. Pemerintah kabupaten/kota terindikasi kekurangan anggaran, bahkan ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang hanya memberi anggaran sedikit.

Kondisi ini mengakibatkan sekolah memungut biaya dari masyarakat demi terlaksananya proses pembelajaran. Sehingga para wali murid tidak mampu membayar biaya pendidikan, tidak dapat menyekolahkan putra-putrinya. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan nasional yang termasuk di Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana negara berkewajiban untuk setiap warga negaranya. Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga yang dijamin oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya pemerataan akses dan peningkatan mutu Pendidikan, pemerintah meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional satuan Pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS tidak ditujukan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kelangsungan proses pembelajaran ke kelas serta pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan. Dalam pengelolaannya, diperlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh (Tuzahra et al., 2022) bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi *stakeholder* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengelolaan dana Pendidikan. Selain itu, efektifitas manajemen dana BOS sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah. (Syahbuddin, 2020) menekankan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana BOS harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata sekolah dan petunjuk teknis pemerintah agar tepat sasaran dan mendorong peningkatan mutu Pendidikan. Studi lain oleh (Abdul, 2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOS sangat dan bergantung pada kesepakatan dan kerja sama antara tim manajemen BOS dan seluruh elemen sekolah. Lebih lanjut, menurut (Rahmatullah., 2024), keterlibatan guru dan komite sekolah yang tinggi dalam perencanaan serta pengelolaan dana BOS terbukti meningkatatkan

kualitas pembelajaran dan motivasi siswa. Partisipasi aktif seluruh pihak ini menciptakan lingkungan Pendidikan yang inklusif dan terbuka. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya sekedar menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya di Indonesia. Pendidikan merupakan komponen strategi dan salah satu kunci utama untuk meningkatkan derajat hidup seseorang. Pendidikan juga merupakan usaha atau proses mengembangkan kepribadian diri seseorang dari segi spiritual dan jasmani. Adanya kebutuhan dalam kemajuan suatu bangsa adalah peran pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan untuk dapat menjadikan manusia sebagai kebutuhan sumber daya manusia yang baik dalam pembangunan bangsa, maka dari itu sekolah menjadi lembaga yang sangat diharapkan untuk dapat menanggapi permasalahan sosial serta tuntutan-tuntutan yang terjadi dan diharapkan membuat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) agar menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas sesuai dengan tujuan bangsa yang tertera dalam Pembukaan Undang Undang Dasar RI 1945. Perkembangan bidang pendidikan harus mengikuti tren terbaru dan harus sesuai dengan adanya UUD 1945, negara harus memprioritaskan anggaran untuk pendidikan. Dengan adanya tujuan negara yang disebutkan, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan prioritas pendidikan yang berkualitas selama 9 tahun sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuat Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan untuk masyarakat yang kurang dapat menjangkau pendidikan dasar. Pemerintah memberikan perhatian penuh bagi setiap lembaga pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua masyarakat maka Pemerintah mengupayakan dengan menyelenggarakan program bantuan operasional sekolah (BOS).

Dana yang diperoleh dari Pemerintah akan disalurkan kepada setiap instansi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sasaran program Pemerintah ini pada umumnya untuk pembiayaan atau pendanaan kebutuhan sekolah bagi satuan pendidikan yang disalurkan ke semua sekolah dengan tujun mutu pendidikan semakin meningkat. Seluruh dana BOS yang diterima sekolah merupakan tanggungjawab sekolah dan harus dikelola sebaik-baiknya. Setiap penggunaan dari anggaran dana bantuan operasional sekolah di pertanggungjawabankan dengan melaporkan dana BOS kemudian di stor ke Kantor Dinas Pendidikan dan setiap pertanggungjawabannya direkap dan dicatat sesuai prosedur dalam penggunaan program dana BOS. Kualitas dari pendidikan di Indonesia pada akhir-akhir ini sangat memprihatinkan.

Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya, kelemahan dalam sektor manajemen pendidikan, terjadi kesenjangan sarana dan prasarana

pendidikan di daerah kota dan desa, dukungan dari pemerintah yang masih lemah, adanya pola pikir kuno dalam masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya pengajar, dan lemahnya standar evaluasi pembelajaran. Beberapa hal di atas lah yang menjadi faktor kualitas pendidikan di Indonesia rendah. Selain dari beberapa hal di atas, ada juga terjadinya problem dalam pembelajaran. Hal itu pun salah satu sebab menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia bangsa tersebut. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari sumber daya manusia tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Indonesia yang pada dasarnya adalah negara berkembang, tentu bisa saja menjadi negara yang maju apabila pendidikannya sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Namun, pada kenyataannya pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan sehingga kualitas pendidikan di Indonesia berada di tingkat terendah tertinggal dengan negara-negara lainnya.

Beberapa faktor penunjang keberlangsungan pendidikan di lembaga pendidikan diantaranya adalah: (1) guru dan tenaga kependidikan yang profesional; (2) adanya sarana prasarana yang memadai; (3) manajemen sistem pendidikan yang tertata; (4) pembiayaan pendidikan yang tercukupi; serta (5) manajemen kurikulum dan program sekolah yang berjalan dengan baik (Nurdiyanti, 2021). Pembiayaan dalam pendidikan termasuk komponen penting yang efektif dan instrumental untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Biaya pendidikan yang memadai akan memudahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Pendidikan tanpa adanya pembiayaan yang baik, tidak dapat berlangsung secara maksimal. Pembiayaan pendidikan menjadi bukti keseriusan pemerintah atau pelaku pendidikan dalam menjalankan program pendidikan di lembaganya. (Mesiono & Roslaeni 2021), Ada beberapa model pembiayaan pendidikan yang banyak dilakukan. Negara maju membiayai pendidikan secara penuh oleh negara. Berbeda dengan negara-negara berkembang yang menggunakan anggaran daerah untuk membiayai pendidikan di daerahnya, termasuk di Indonesia. Pada realisasinya, kesungguhan pemerintah serta pelaku pendidikan dalam merealisasikan anggaran pendidikan dinilai kurang maksimal. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum optimal dalam hal pengelolaan dana serta pelaksanaan pendidikannya (Mesiono & Roslaeni 2021).

Keberhasilan suatu program BOS dapat dipengaruhi oleh faktor pengelolaan dana dan sumber daya yang ada dalam pengelolaan dana BOS. Program BOS dapat dikatakan efektif dan efisien apabila pengelolaan dalam mencapai tujuan program BOS dengan benar dan maksimal. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan berperan penting dalam penentuan penggunaan dana BOS apakah efektif atau tidak pengelolaan dana BOS tergantung dari masing-masing lembaga. Apabila dalam pengelolaan dana BOS tidak maksimal akan muncul hambatan atau permasalahan dalam penggunaan dana BOS.

Dalam Islam diperintahkan pada saat melakukan pekerjaan harus senantiasa efektif dan efisien, maksudnya dalam mencapai suatu tujuan, bermutu, tepat sasaran, berbelanja sesuai keperluan, memaksimalkan anggaran, tidak menghambur-hamburkan dan kikir dari keberhasilan atau kekayaan yang diperoleh sebagaimana firman-Nya Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 67 :

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: "*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar*." (Al-Furqan: 67).

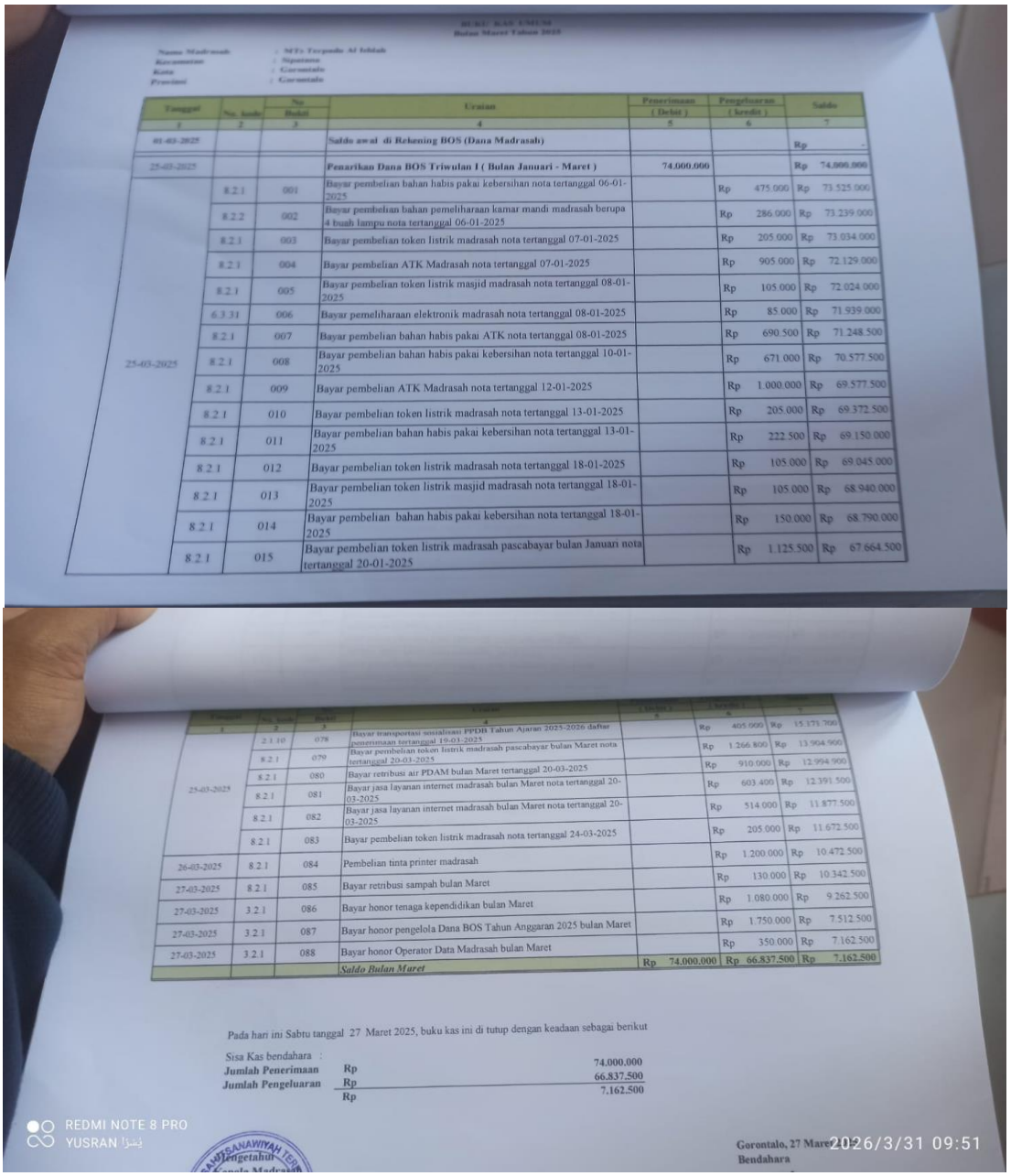
Al-Qur'an berkali-kali menjelaskan pentingnya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah SWT beberapa derajat. Derajat yang dimaksudkan dapat bermakna kedudukan, kelebihan atau keutamaan dari makhluk lainnya, dan hanya Allah SWT. yang lebih mengetahuinya tentang bentuk dan jenisnya serta kepada siapa yang akan ditinggikan derajatnya. Mengingat masalah yang berhubungan dengan pendidikan menurut al-Qur'an meliputi berbagai masalah, maka dalam tulisan ini akan dibatasi dengan mengangkat fokus pembahasan meliputi: pengertian dan tujuan pendidikan menurut al Qur'an serta metode-metode pendidikan menurut al-Qur'an Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju ketingkat kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (peserta didik) untuk dapat membuat manusia (peserta didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (peserta didik) lebih kritis dalam berpikir.

Salah satu sekolah yang menerima anggaran dana BOS adalah Sekolah Al-Islah Kota Gorontalo yang pengelolaannya dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban. Melalui dana BOS yang diterima oleh Sekolah maka pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana memperoleh layanan pendidikan bagi siswa serta dapat mengurangi biaya sekolah bagi orang tua siswa, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya dana BOS ini diharapkan bisa membantu untuk proses pembiayaan sekolah, Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BOS dirancang untuk mendukung penyediaan dana bagi sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan operasional dasar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana BOS sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dan transparansinya, tantangan tersebut yaitu sekolah seringkali mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana BOS dan pihak sekolah kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS. Urgensi penelitian ini didasari oleh pentingnya pengelolaan dana BOS yang efektif dan transparan untuk memastikan bahwa dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pihak sekolah, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, tujuan dari pemberian dana BOS tidak tercapai, yang pada akhirnya dapat merugikan siswa sebagai penerima manfaat utama.

Selain itu juga pencairan dana BOS pada sekolah Al-Ishlah Kota Gorontalo masih belum sesuai dengan jadwal yang direncakan karena pencairan dana BOS mengalami keterlambatan yang dipengaruhi keuangan sekolah selain itu juga keterlambatan ini menjadi hambatan berjalannya suatu kegiatan di sekolah Al- Ishlah Kota Gorontalo dan juga dapat merugikan siswa sebagai penerima manfaat dari adanya dana BOS tersebut, keterlambatan ini juga mengakibatkan pihak sekolah pelaporan dana BOS mengalami keterlabatan. Pada tahun 2025 sekolah Al-Islah Kota Gorontalo menerima dana BOS triwulan pertama pada bulan maret dengan jumlah Rp. 74.525.000 yang seharusnya dana BOS tersebut cair pada bulan januari 2025 dan pelaporannya pada bulan juni 2025, pada triwulan kedua sekolah menerima dana BOS pada bulan juli sebesar Rp. 74.525.000 yang seharusnya dana BOS tersebut diterima pada bulan april dan untuk pelaporannya pada bulan september 2025 sedangkan pada triwulan 3 dan 4 sekolah menerima dana BOS pada bulan oktober 2026 sebesar Rp.149.050.000 dan pelaporannya dilakukan pada tanggal 3-4 januari 2026. Berikut merupakan laporan petanggaungjawaban pihak sekolah untuk penggunaan dana BOS :



Bulan Maret Tahun 2025

Nama Madrasah : MTs Terpadu Al Ishlah
Kecamatan : Sipatana
Kota : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo

Tanggal	No. Bukti	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-03-2025			Saldo awal di Rekening BOS (Dana Madrasah)			Rp -
25-03-2025			Penarikan Dana BOS Triwulan I (Bulan Januari - Maret)	74.000.000		Rp 74.000.000
25-03-2025	8.2.1	001	Bayar pembelian bahan habis pakai kebersihan nota tertanggal 06-01-2025		Rp 475.000	Rp 73.525.000
	8.2.2	002	Bayar pembelian bahan pemeliharaan kamar mandi madrasah berupa 4 buah lampu nota tertanggal 06-01-2025		Rp 286.000	Rp 73.239.000
	8.2.1	003	Bayar pembelian token listrik madrasah nota tertanggal 07-01-2025		Rp 205.000	Rp 73.034.000
	8.2.1	004	Bayar pembelian ATK Madrasah nota tertanggal 07-01-2025		Rp 905.000	Rp 72.129.000
	8.2.1	005	Bayar pembelian token listrik masjid madrasah nota tertanggal 08-01-2025		Rp 105.000	Rp 72.024.000
	6.3.31	006	Bayar pemeliharaan elektronik madrasah nota tertanggal 08-01-2025		Rp 85.000	Rp 71.939.000
	8.2.1	007	Bayar pembelian bahan habis pakai ATK nota tertanggal 08-01-2025		Rp 690.500	Rp 71.248.500
	8.2.1	008	Bayar pembelian bahan habis pakai kebersihan nota tertanggal 10-01-2025		Rp 671.000	Rp 70.577.500
	8.2.1	009	Bayar pembelian ATK Madrasah nota tertanggal 12-01-2025		Rp 1.000.000	Rp 69.577.500
	8.2.1	010	Bayar pembelian token listrik madrasah nota tertanggal 13-01-2025		Rp 205.000	Rp 69.372.500
	8.2.1	011	Bayar pembelian bahan habis pakai kebersihan nota tertanggal 13-01-2025		Rp 222.500	Rp 69.150.000
	8.2.1	012	Bayar pembelian token listrik madrasah nota tertanggal 18-01-2025		Rp 105.000	Rp 69.045.000
	8.2.1	013	Bayar pembelian token listrik masjid madrasah nota tertanggal 18-01-2025		Rp 105.000	Rp 68.940.000
	8.2.1	014	Bayar pembelian bahan habis pakai kebersihan nota tertanggal 18-01-2025		Rp 150.000	Rp 68.790.000
	8.2.1	015	Bayar pembelian token listrik madrasah pascabayar bulan Januari nota tertanggal 20-01-2025		Rp 1.125.500	Rp 67.664.500
25-03-2025	2.1.10	078	Bayar transportasi sosialisasi PPDB Tahun Ajaran 2025-2026 daftar penerimaan tertanggal 19-03-2025		Rp 405.000	Rp 15.171.700
	8.2.1	079	Bayar pembelian token listrik madrasah pascabayar bulan Maret nota tertanggal 20-03-2025		Rp 1.266.800	Rp 13.904.900
	8.2.1	080	Bayar retribusi air PDAM bulan Maret tertanggal 20-03-2025		Rp 910.000	Rp 12.994.900
	8.2.1	081	Bayar jasa layanan internet madrasah bulan Maret nota tertanggal 20-03-2025		Rp 603.400	Rp 12.391.500
	8.2.1	082	Bayar jasa layanan internet madrasah bulan Maret nota tertanggal 20-03-2025		Rp 514.000	Rp 11.877.500
	8.2.1	083	Bayar pembelian token listrik madrasah nota tertanggal 24-03-2025		Rp 205.000	Rp 11.672.500
26-03-2025	8.2.1	084	Pembelian tinta printer madrasah		Rp 1.200.000	Rp 10.472.500
27-03-2025	8.2.1	085	Bayar retribusi sampah bulan Maret		Rp 130.000	Rp 10.342.500
27-03-2025	3.2.1	086	Bayar honor tenaga kependidikan bulan Maret		Rp 1.080.000	Rp 9.262.500
27-03-2025	3.2.1	087	Bayar honor pengelola Dana BOS Tahun Anggaran 2025 bulan Maret		Rp 1.750.000	Rp 7.512.500
27-03-2025	3.2.1	088	Bayar honor Operator Data Madrasah bulan Maret		Rp 350.000	Rp 7.162.500
			Saldo Bulan Maret	Rp 74.000.000	Rp 66.837.500	Rp 7.162.500

Pada hari ini Sabtu tanggal 27 Maret 2025, buku kas ini di tutup dengan keadaan sebagai berikut

Sisa Kas bendahara :
Jumlah Penerimaan Rp 74.000.000
Jumlah Pengeluaran Rp 66.837.500
Rp 7.162.500

Mengetahui

Gorontalo, 27 Maret
Bendahara

REDMI NOTE 8 PRO
YUSRAN
2026/3/31 09:51

Gambar 1.1 Laporan Dana BOS

Sumber : Sekolah Al-Islah Kota Gorontalo (2026)

Akibat dari keterlambat dana BOS ini juga mengganggu adanya proses belajar mengajar di sekolah karena dana BOS membiayai kebutuhan operasional, sarana prasarana, hingga kesejahteraan guru, yang secara langsung mendukung kelancaran dan peningkatan mutu pendidikan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat dan transparan. Keterlambatan ini juga sangat berpengaruh pada pengelolaan dana BOS dimana menyebabkan penundaan program prioritas, hambatan operasional, hingga potensi penyimpangan, karena sekolah terpaksa mencari solusi sementara serta dapat menimbulkan permalasalahan pada saat pelaporan, dimana keterlambatan pencairan dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan, yang berujung pada teguran atau penundaan pencairan di

periode berikutnya. Keterlambatan dana BOS ini membuat sekolah memakai dana dari yayasan untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dengan adanya fenomena ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadapa efektivitas dana BOS dengan judul Hasil Penelitian "**Analisis Efektivitas Penggunaan Dana BOS Dalam Laporan Keuangan Sekolah Al-Ishlah Kota Gorontalo**"

1.2 Identifikasi Masalah

Adanya keterlambatan pencairan dana BOS di sekolah sehingga mempengaruhi pelaporan dana BOS

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus masalah yang diambil oleh penulis yaitu bagaimanakah Efektivitas penggunaan dana BOS disekolah Al-Islah Kota Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan dana BOS dalam laporan keuangan sekolah Al-Islah Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, serta dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai efektivitas dana BOS disekolah Al-Islah Kota Gorontalo

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, terutama bagi Manajemen Sumber daya Manusia serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

1.5.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Sekolah yang ada di Gorontalo

1.5.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan, kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah